

# ANALISIS PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT KRESNA DUTA AGROINDO

Sahril Cynde <sup>1</sup>, Elfeda Aplonia Lau <sup>2</sup>, Yuyun Hadi Suparto <sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : syahrilcynde65@gmail.com

---

**Keywords :**

Pembebanan, Pajak  
Penghasilan Pasal 21

---

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyze the calculation of Income Tax (PPH) Article 21 on the salaries of employees of PT Kresna Duta Agroindo based on Minister of Finance Regulation Number 58 of 2023 concerning income tax withholding rates Article 21 on income in connection with work, services or activities of individual taxpayers.personal. The research population was employees of PT Kresna Duta Agroindo, totaling 214 employees consisting of 25 permanent employees and 189 non-permanent employees. The sample was specifically for 25 permanent employees of PT Kresna Duta Agroindo. The analysis used is the calculation of Income Tax (PPH) 21 on the salaries of employees of PT Kresna Duta Agroindo according to Minister of Finance Regulation Number 58 of 2023 concerning income tax withholding rates article 21 on income in connection with work, services or activities of individual taxpayers.*

*The results of the research show that PT Kresna Duta Agroindo has not implemented income tax (PPH) 21 calculations according to Law No. 58 of 2023 concerning income tax withholding rates article 21 on income in connection with work, services or activities of individual taxpayers, because in PT Kresna's calculations Duta Agroindo, Sukamaju Village, Kongbeng District, East Kutai Regency is still using Law No. 7 of 2021 concerning harmonization of tax regulations*

---

## PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan serta warga negara sebagai wajib pajak, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembagunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembagunan. Segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumberdaya dari perusahaan kesektor publik. Perpindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belajar perusahaan. Pajak merupakan sumber daya yang dapat di pengaruhi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk lain.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi yang masa akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya ketentuan tersebut yaitu mengenai *SelfAssessment System*. Dalam

*SelfAssessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemotongan PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 merupakan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang Pajak penghasilan.

PT Kresna Duta Agroindo merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. PT Kresna Duta Agroindo ini terletak di daerah Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. PT Kresna Duta Agroindo ini mempunyai jumlah karyawan yang banyak dengan spesifikasi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu PT Kresna Duta Agroindo juga berpotensi terhadap penyimpanan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Fenomena yang terjadi pada PT Kresna Duta Agroindo yaitu cukup sering kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di duga belum sepenuhnya menerapkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Kresna Duta Agroindo”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) yang menyatakan bahwa :Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang- undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Suandy Erly (2016:105) menyatakan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Orang Pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018:60),”Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Menurut Mardiasmo (2016: 197) Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang- undang Pajak Penghasilan.

Menurut Mulyo Agung (2014:34) pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kewajiban dibidang sosial dan ekonomi.

## METODE

### Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)  
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*), yaitu mencari data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan PT Kresna Duta Agroindo yang terlibat.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder berupa gambaran umum PT Kresna Duta Agroindo, struktur organisasi dan deskripsi tugas PT Kresna Duta Agroindo dan data gaji karyawan PT Kresna Duta Agroind

### Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Gaji Karyawan PT Kresna Duta Agroindo Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023

Setelah diperoleh daftar gaji karyawan PT Kresna Duta Agroindo dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji karyawan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Gaji Pokok	Xxx	
Tunjangan Istri/Suami	Xxx	
Tunjangan Anak	Xxx	
		Xxx
Tj Fungsional/Tj Fungsional	Xxx	
Tunjangan Beras	Xxx	
Tunjangan Pajak	Xxx	
Tunjangan BPJS Kes 4%	Xxx	
Tunjangan JKK	Xxx	
Tunjangan JKM	Xxx	
Pembulatan	Xxx	
Penghasilan Bruto		Xxx
TER Golongan	Xxx	
PPH Pasal 21 Per Bulan		Xxx

### Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Kresna Duta Agroindo ini terletak di daerah Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dikhususkan pada Perhitungan pajak penghasilan karyawan menurut PT Kresna Duta Agroindo dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan PT Kresna Duta Agroindo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bulan Mei 2024 atas gaji karyawan tetap PT Kresna Duta Agroindo yang dibayarkan sebesar Rp 824.875,00. Total dari perhitungan diatas memiliki selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 312.078,52.

**Tabel 1** Pebandingan Perhitungan PPh 21 Menurut PT Kresna Duta Agroindo dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

<b>N0</b>	<b>Inisial Karyawan</b>	<b>Status Pajak</b>	<b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Kresna Duta Agroindo (Rp)</b>	<b>Perhitungan PPh 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023. (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
1	RB	TK0	36.600,00	33.399,78	20.986,82
2	R	TK0	0,00	0	0,00
3	AS	K2	57.635,00	33.217,53	24.417,47
4	AMS	K1	68.330,00	64.377,86	3.952,14
5	AMS	TK2	46.560,00	45.419,63	1.140,37
6	AAR	K1	25.550,00	0	25.550,00
7	AR	TK1	0,00	0	0,00
8	WA	K1	29.675,00	52.077,49	-22.402,49
9	WA	K3	0,00	0	0,00
10	J	TK0	36.875,00	13.726,52	23.148,48
11	J	TK2	18.185,00	0	18.185,00
12	A	K1	61.480,00	33.558,69	27.921,31
13	A	TK0	0,00	0	0,00
14	SA	K1	50.370,00	32.580,20	17.789,80
15	TM	K0	5.780,00	0	5.780,00
16	ML	K1	6.880,00	0	6.880,00
17	SP	K1	26.820,00	28.540,55	-1.720,55
18	FS	K1	43.515,00	15.990,545	27.524,46
19	FSW	K1	0,00	0	0,00
20	MAJ	K1	97.430,00	73.422,94	24.007,06
21	MJ	TK0	89.860,00	54.070,16	35.789,84
22	RN	TK1	8.190,00	0	8.190,00
23	RN	K3	66.220,00	33.974,70	32.245,30
24	ED	K2	48.920,00	16.226,49	32.693,51
25	EI	K1	0,00	0	0,00
	<b>Total</b>		<b>824.875,00</b>	<b>530.583,085</b>	<b>312.078,52</b>

**Sumber: Diolah Peneliti 2024**

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas karyawan tetap pada PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Perhitungan pada tabel 5.2 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terlihat paling tinggi karyawan nomor: 4). AMS sebesar Rp 64.377,86 20).MAJ sebesar Rp 73.422,94.

Perhitungan Pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan tetap PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdapat 11 karyawan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena penghasilan bruto sebulan lebih kecil dari total penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 banyaknya TER Gol A 7 karyawan, TER B 16 Karyawan, TER C 2 Karyawan. Total tarif

efektifitas terbanyak yaitu karyawan dengan TER Gol B dengan PTKP:TK/2 & K/1 (63 Juta); TK/3 & K/2 (67,5 Juta).

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas gaji karyawan tetap menurut PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 824.875,00 dan hasil perhitungan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 530.583,085. Terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 312.078,52. Perusahaan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut karena dalam perhitungan PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur masih menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Total perhitungan pajak penghasilan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 per januari 2024 karyawan dengan TER Gol A dengan 1% dengan PTKP:TK/0(54 Juta);TK/1 & K/0 (58,5 Juta) Lapisan Penghasilan Bruto 6.300.000 – 6.750.000 Juta. TER Gol B dengan 1% dengan PTKP:TK/2 K/1 (63 Juta);TK/3 & K/2 (67,5 Juta) Lapisan Penghasilan Bruto 7.300.000 – 9.200.000 Juta. Namun, TER Gol C Lapisan Penghasilan Bruto paling kecil yaitu 0%.

Berdasarkan hasil analisis, maka hipotesis penelitian diterima karena perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur memiliki selis hitung dengan hasil perhitungan menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 hal tersebut karena perusahaan masih menerapkan perhitungan pajak penghasilan menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 menurut UU No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut karena dalam perhitungan PT Kresna Duta Agroindo Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur masih menggunakan UU No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan disarankan:

1. Bagi PT Kresna Duta Agroindo  
PT Kresna Duta Agroindo diharapkan kedepannya selalu update tentang perhitungan, pelaporan dan penyeteroran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.
2. Bagi Pembaca  
Bagi peneliti lanjutan yang akan meneliti tentang PPh Pasal 21, dapat mengambil obyek penelitian yang berbeda ataupun menerapkan pada perusahaan lainnya dengan mengacu pada PPh 21 terbaru tahun 2023.

## **REFERENCES**

- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia: Lentera Ilmu Cendekia*.  
Erly Suandy, 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mardiasmo, 2016 *Perpajakan Edisi terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi  
\_\_\_\_\_, 2018 *Perpajakan Edisi terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi